



PEMERINTAH
KOTA BEKASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

LKIP
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Bekasi,

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI



DR. RENY HENDRAWATI, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2019 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018- 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dengan hasil **capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 162.9%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **SANGAT BAIK** dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah, terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dengan capaian sebesar 100,9%
2. Pencapaian sasaran strategis 2 meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sebesar 312.5%
3. Pencapaian sasaran strategis 3 meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sebesar 50%

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2019 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar 162.9% dari target. Meskipun masih terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu . Ke depan untuk mencapai visi Walikota Bekasi berupa terwujudnya Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan melalui pelaksanaan misi kesatu yaitu : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi dan *stakeholder* yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat

berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah Kota Bekasi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 66,052,371,976,- telah direalisasi sebesar Rp48,059,607,382,-. Atau 72.76% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	1
1.3. PERMASALAHAN UTAMA.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023.....	9
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	12
3.1.1. FORMULASI PERHITUNGAN	12
3.1.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	13
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	27
3.4.1. KEUANGAN	27
3.4.2. SARANA DAN PRASARANA	28
3.5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	29
BAB IV PENUTUP	31
4.1. KESIMPULAN.....	31
4.2. RENCANA TINDAK	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33
LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA.....	34
LAMPIRAN II RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2019.....	45
LAMPIRAN III REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI.....	50
LAMPIRAN IV PRESTASI DAN PENGHARGAAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Tabel 2	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 3	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel 4	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi	10
Tabel 6	Program pada Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah kota Bekasi	11
Tabel 7	Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	12
Tabel 8	Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis 2 Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	12
Tabel 9	Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis 3 Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	13
Tabel 10Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019	13
Tabel 11	Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 1	14
Tabel 12	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kota Bekasi	14
Tabel 13	Nilai dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16
Tabel 14	Rekapitulasi Nilai SKM Unit Pelayanan.....	18
Tabel 15	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kota Bekasi	18
Tabel 16	Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 2	19
Tabel 17	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi.....	20
Tabel 18	Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 3	23
Tabel 19	Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi	24
Tabel 20	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2019 ..	26
Tabel 21	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2019	26
Tabel 22	Peralatan/Kendaraan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi	28
Tabel 23	Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi	4
Gambar 2.	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Gambar 3.	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 4.	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan.....	6
Gambar 5.	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan.....	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2019. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun

perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- l. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

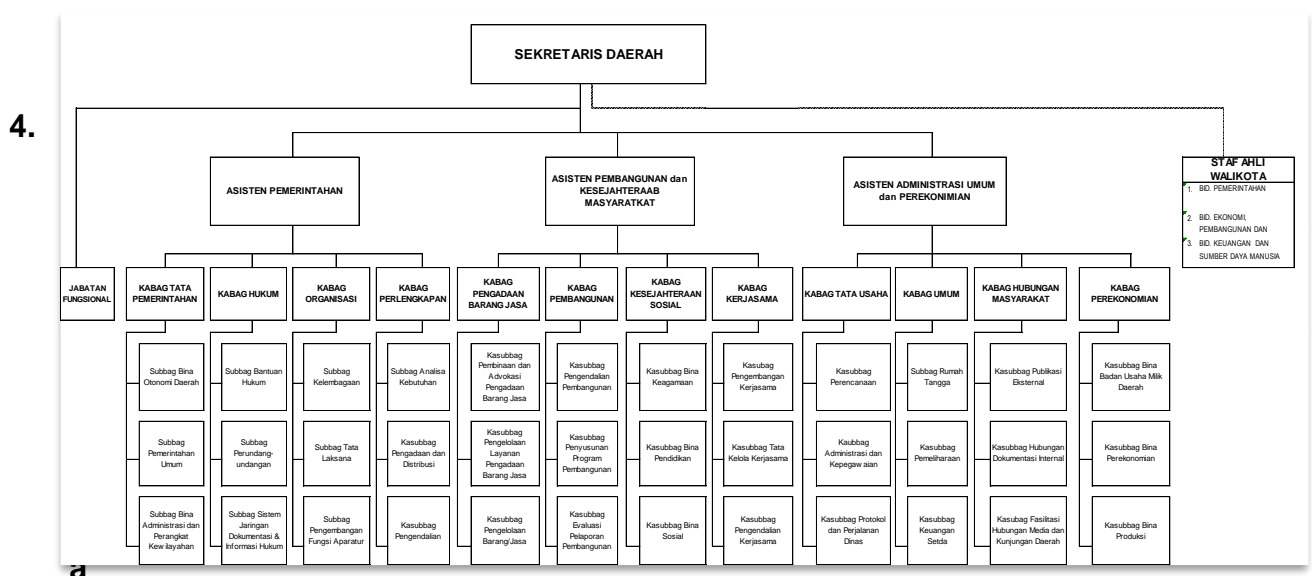
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;

- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c) Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tatalaksana;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur.
 - 4. Bagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- f. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Pembangunan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Sosial;
 - b) Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Bina Pendidikan.
 - 4. Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Tata Kelola Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.

- g. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - c) Sub Bagian Perencanaan Setda.
 3. Bagian Humas, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Publikasi Eksternal;
 - b) Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal;
 - c) Sub Bagian Fasilitas Kunjungan Daerah.
 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi



ya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung oleh

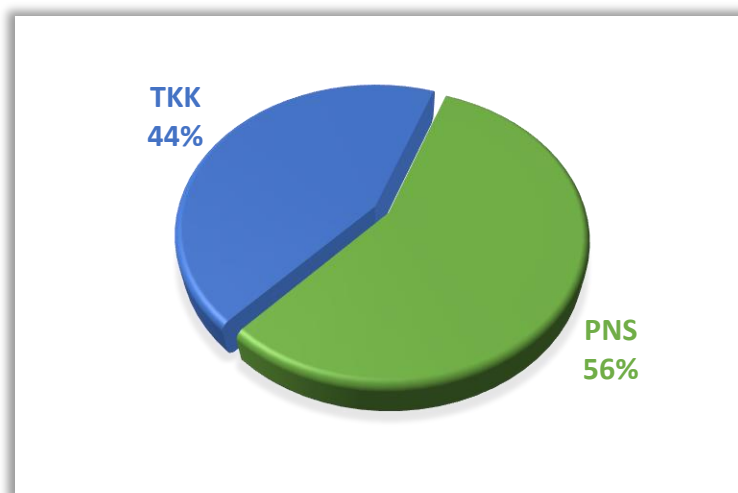
sumber daya manusia sebanyak 394 orang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Status Kepegawaian

PNS	TKK
222	172

Gambar 2.
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Status Kepegawaian

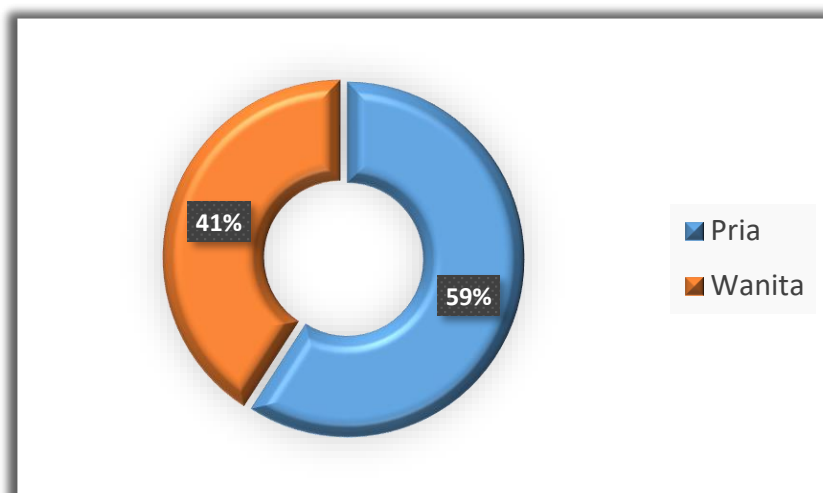


b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2 Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin

PRIA	WANITA
233	161

Gambar 3.
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin

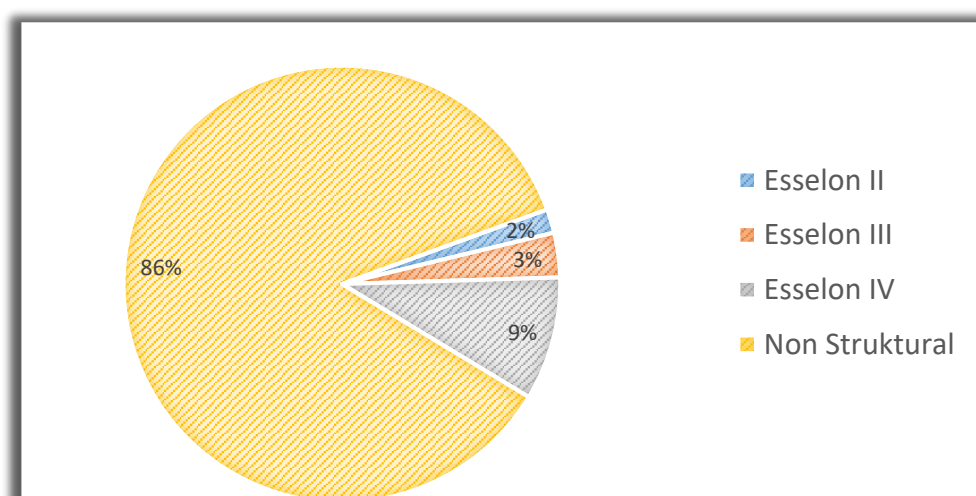


c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 3
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jabatan

NO	ESSELONERING	JUMLAH APARATUR
1	Esselon II	7
2	Esselon III	13
3	Esselon IV	36
4	Non Struktural	338

Gambar 4.
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jabatan

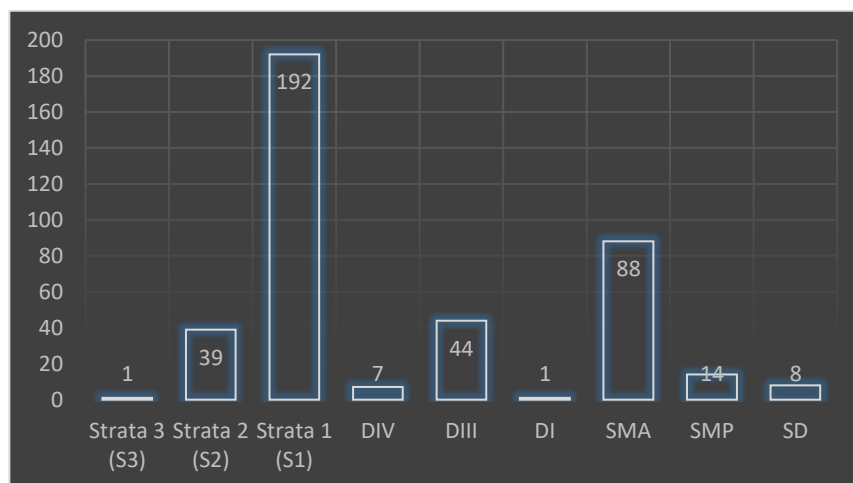


d. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	39
3	Strata 1 (S1)	192
4	DIV	7
5	DIII	44
6	DI	1
7	SMA	88
8	SMP	14
9	SD	8

Gambar 5.
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan



1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama ini antara lain sebagai berikut:

- pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan

- c. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) **Bab I Pendahuluan**, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018–2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019;
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018–2023, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan
- 5) **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional maupun global, sekaligus tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023, Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi menetapkan visi, yaitu **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima)

misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengacu pada pelaksanaan misi ke satu yaitu **“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”** untuk membangun Kota Bekasi. Secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Sebagai Berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100%
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	38%
		Nilai IKM	79
2	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	32%
3	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	100%

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II.a) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk

mewujudkan kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat dukungan anggaran dari APBD Kota sebesar Rp 74,070,575,000 yang digunakan untuk melaksanakan 33 kegiatan yang terangkum dalam 8 program sebagai berikut:

Tabel 6
Program pada Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah kota Bekasi

PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,293,225,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,566,350,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	575,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,000,000.00
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	21,571,000,000.00
Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	600,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	1,375,000,000.00
TOTAL	74,070,575,000.00

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN

3.1.1. FORMULASI PERHITUNGAN

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 7
Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Persentase Capaian IKK yang meningkat	$\frac{\text{Capaian IKK yang Meningkat}}{\text{Seluruh Jumlah IKK}} \times 100\%$	Nilai IKK
Nilai IKM	Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 8
Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis 2
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Mencapai Akuntabilitas Kinerja Baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Nilai AKIP

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 9
Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis 3
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Persentase BUMD dalam kondisi sehat	$\frac{\text{Jumlah BUMD yang Sehat}}{\text{Jumlah BUMD di Kota Bekasi}} \times 100\%$	Hasil Audit Auditor Independen

3.1.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	126.02%
Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	312.5%
Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	50%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.	100%	100%	100%
Persentase Capaian IKK yang meningkat	38%	65,74%	173%
Nilai IKM	79	83	105.06%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 adalah 126.02%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

a. Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian output indikator kinerja ini adalah 100 % yaitu sebanyak 47 Perangkat Daerah dari total 47 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi menerapkan Reformasi Birokrasi.

b. Capaian Kinerja Outcome

Capaian outcome indikator kinerja ini yaitu meningkatnya pencapaian Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi sebagaimana di sajikan dalam table berikut:

Tabel 12
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kota Bekasi

NO	TAHUN	INDEKS RB
1	2016	59.08
2	2017	62.86
3	2018	64.36

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penekanan yang diberikan oleh Wali Kota agar kepala perangkat daerah terlibat dan mengerti dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. Pendampingan yang dilakukan pada tiap-tiap perangkat daerah dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tau workshop;
 3. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bekasi;
 4. Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong pelaksanaan RB;
 5. Perbaiki kualitas pelayanan publik;
 6. Meningkatkan peran Inspektorat selain sebagai unsur pengawas, tetapi juga harus memberikan masukan/ wawasan kepada seluruh perangkat daerah.
- d. Kendala dalam pencapaian target kinerja
- Dalam penerapan Reformasi Birokrasi ditemukan kendala antara lain: masih rendahnya komitmen serta pemahaman yang belum sepenuhnya mendukung upaya penerapan dan pelaporan Reformasi Birokrasi.

2. Persentase Capaian IKK yang meningkat

- a. Capaian Kinerja Output
- 1) Pada IKK 2.1 (tataran pengambil kebijakan) Terdapat 29 Indikator kinerja kunci yang meningkat pada tahun 2019 dari 38 IKK yang ada. IKK yang meningkat tersebut antara lain:
 - Meningkatnya jumlah rumah berIMB dimana jumlah rumah yang memiliki IMB pada tahun 2019 meningkat dibanding dengan tahun 2018;
 - Peningkatan jumlah perda, raperda, kepwal dan perwal yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018; dan
 - Jumlah persetujuan investasi yang meningkat sebanyak 280 ijin yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh DPMPTSP.
 - 2) Pada IKK 2.2 (tataran pelaksana kebijakan) tidak terdapat kenaikan karena target hanya pemenuhan data 2.1 IKK.
 - 3) Pada IKK 2.3 (tataran pelaksana kebijakan) aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan) terdapat 16 IKK yang meningkat dari 29 IKK yang ada. IKK yang meningkat antara lain :
 - Jumlah angka melanjutkan yang naik 0.6% dibanding tahun lalu;
 - Persentase kelurahan UCI yang naik sebanyak 1.86%;

- Jumlah kawasan dan perumahan kumuh yang tertata sebanyak 0.37%;
- luas ruang terbuka hijau naik sebanyak 0.26%;
- Rumah layak huni yang meningkat sebesar 1.32%;
- Pencari kerja yang ditempatkan naik sebesar 3.53%;
- Angkatan kerja perempuan naik sebesar 16.95%;
- Peserta KB aktif naik sebesar 0.3%;
- Jumlah koperasi aktif naik sebesar 18.26%;
- Peningkatan jumlah investasi 15.78%, dan
- Pelaksanaan festival seni dan budaya yang dilaksanakan lebih banyak pada tahun 2019 dibanding 2018 yaitu sebanyak 23 festival.

Ikk yang meningkat tersebut merupakan ikk lama yang masih digunakan pada tahun 2019 dikarenakan telah diberlakukannya PP 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pengganti atas PP nomor 3 tahun 2007.

b. Capaian Kinerja Outcome

Meningkatnya nilai pemenuhan dan capaian IKK baik IKK 2.1 (tataran pengambil kebijakan), IKK 2.2 (tataran pelaksana kebijakan) maupun IKK 2.3 (tataran pelaksana kebijakan) mendukung kepada peningkatan nilai LPPD yang diperoleh Kota Bekasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13
Nilai dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	TAHUN	NILAI	PERINGKAT
1	2016	3.3898	27
2	2017	3.2154	30
3	2018	3.2546	17
4	2019	3.3709*	15

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi teknis penyusunan sekaligus penyampaian form dan pengisian IKK untuk diisi oleh masing Perangkat Daerah;
2. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki data utama seperti Data Keuangan dan Aset dengan BPKAD, data Kepegawaian dengan BKPPD, dan program perencanaan

Pembangunan dengan Bappeda, data kependudukan dengan Dispendukcapil agar tidak terjadi kerancuan data saat pengisian Indikator Kinerja Kunci;

3. Melakukan desk terhadap data IKK pada setiap Perangkat Daerah karena setiap data IKK yang di isikan harus ada data pendukungnya;
4. Menyampaikan kekurangan data dan peningkatan data kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Rapat Koordinasi untuk segera dicukupi;

d. Kendala dalam pencapaian target kinerja

Dalam pemenuhan data IKK ditemukan kendala antara lain:

1. masih rendahnya komitmen serta pemahaman perangkat daerah baik pada level pimpinan, kepala bidang maupun kepala seksi terhadap tanggung jawab pemenuhan data capaian kinerja(IKK)
2. Ketidak tersediaan dokumen pendukung IKK pada perangkat daerah karena perangkat daerah lebih focus pada realisasi kegiatan dan anggaran, bukan pada pencapaian indikator kinerja kunci.
3. Diberlakukannya PP 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pengganti atas PP nomor 3 tahun 2007.

5. Nilai IKM.

a. Capaian Kinerja Output

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Tahun 2019 dari 11 unit layanan publik 10 unit layanan publik (90.9%) mempunyai nilai SKM baik dan 1 unit layanan publik (9%) mempunyai nilai SKM Sangat baik.

Tabel 14
Rekapitulasi Nilai SKM Unit Pelayanan

No	Kategori Nilai SKM	Jumlah Unit Pelayanan	Persentase
1	Sangat Baik	1	9.1%
2	Baik	10	90.9
Total		11	

Dari SKM didapatkan Nilai IKM Sekretariat Daerah memperoleh nilai IKM 83 termasuk dalam kategori mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik. Hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari 927 responden.

b. Capaian Kinerja Outcome

kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Sekretariat Daerah untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance dalam rangka peningkatan pencapaian Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi sebagaimana di sajikan dalam table berikut:

Tabel 15
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kota Bekasi

NO	TAHUN	INDEKS RB
1	2016	59.08
2	2017	62.86
3	2018	64.36

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Adanya perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan dari dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;
 2. Asistensi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat juga difasilitasi melalui Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup Whatsapp, seluruh peserta mendapat arahan teknis tentang pelaksanaan survey dengan lebih cepat serta progress yang dicapai sesuai tahapan survey dapat dipantau oleh Bagian Organisasi;
 3. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala dan intensif oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi
- d. Kendala dalam pencapaian target kinerja
- Dalam penerapan Reformasi Birokrasi ditemukan kendala antara lain: masih rendahnya komitmen serta pemahaman yang belum sepenuhnya mendukung upaya penerapan dan pelaporan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	32%	100%	312.5%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 312.5%.

Analisis capaian IKU adalah sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)

a. Capaian Kinerja Output

Pada Tahun 2018, dari 47 Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal B adalah 47 SKPD. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi

NO	OPD	NILAI	
1	SETDA	73.88	BB
2	SETWAN	76.12	BB
3	ITKO	81.55	A
4	BALITBANG	70.15	BB
5	BAPENDA	79	BB
6	BAPPEDA	85.95	A
7	BKPPD	76.94	BB
8	BPBD	77.85	BB
9	BPKAD	81.74	A
10	DINAS DAMKAR	71.37	BB
11	DBMSDA	70.38	BB
12	DISARSIPDA	71.63	BB
13	DISPERPUSDA	70.28	BB
14	DINKES	75.9	BB
15	DINSOS	75.09	BB
16	DINAS LH	75.24	BB
17	DISDAGPERIN	70.81	BB
18	DISDIK	75.14	BB
19	DISHUB	72.27	BB
20	DISKETAPANG	70.88	BB
21	DISKOMINFO	76.44	BB
22	DISKOPUKM	71.2	BB
23	DISNAKER	70.79	BB
24	DISPARBUD	71.88	BB

NO	OPD	NILAI	
25	DISPERKIMTAN	70.14	BB
26	DISPORA	74.32	BB
27	DISTANIKAN	71.56	BB
28	DISTARU	70.21	BB
29	DP3A	72.79	BB
30	DPMPTSP	81.9	A
31	DPPKB	72.81	BB
32	DISDUKCAPIL	70.58	BB
33	KEC.BANTARGEBAWANG	71.25	BB
34	KEC. BEKASI BARAT	70.24	BB
35	KEC. BEKASI SELATAN	73.49	BB
36	KEC.BEKASI TIMUR	70.05	BB
37	KEC. BEKASI UTARA	71.79	BB
38	KEC.JATIASIH	70.56	BB
39	KEC.JATISAMPURNA	70.05	BB
40	KEC.MEDANSATRIA	70.59	BB
41	KEC.MUSTIKAJAYA	70.93	BB
42	KEC.PONDOKGEDE	70.91	BB
43	KEC. PONDOKMELATI	72.97	BB
44	KEC. RAWALUMBU	70.59	BB
45	BADAN KESBANGPOL	70.27	BB
46	RSUD	91.88	AA
47	SATPOL PP	79.22	BB

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa realisasi Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal B sebesar 100%. Sehingga, capaian untuk indikator ini adalah 312.5%

b. Capaian Kinerja Outcome

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi memperoleh nilai AKIP sebesar 66.28 atau predikat “B” (Baik). Hasil ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang baik. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai berjalan.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memastikan seluruh target kinerja diturunkan ke level Perangkat Daerah
2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu untuk seluruh Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
4. Melakukan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
6. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu sebagai dasar penentuan tunjangan tambahan penghasilan;
7. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (performance based organization);
8. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

d. Kendala dalam pencapaian target kinerja

1. Kurangnya komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah Kota Bekasi;
2. Kurangnya Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan SAKIP untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen SAKIP;

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase BUMD dalam kondisi sehat	100%	50%	50%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 50%.

Analisis capaian IKU adalah sebagai berikut.

Persentase BUMD dalam kondisi sehat

a. Capaian Kinerja Output

Dalam menilai tingkat kesehatan BUMD, Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggunakan Formulasi penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah yang tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

Formulasi ini digunakan untuk melakukan penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Formulasi ini disusun dengan menggunakan metode Balance Score Card. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMD, yang meliputi penilaian:

1. Aspek Keuangan diambil berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan;
2. Aspek Operasional diambil berdasarkan indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, serta *learning and growth*; dan
3. Aspek Administrasi.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan terhadap ketiga aspek tersebut Didapatkan hasil sebagaimana berikut:

Tabel 19
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi

No	PDAM	Total Skor	KATEGORI	
1	PDAM Tirta Bhagasasi	71	A	Sehat
2	PDAM Tirta Patriot	67.5	A	Sehat
3	PT. Sinergi Patriot	60.5	BBB	Kurang Sehat
4	PD Migas	47	BB	Kurang Sehat
5	PD Mitra Patriot	34	B	Kurang Sehat
6	BPRS Syariah Patriot	90	AA	Sehat

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa realisasi BUMD dalam kondisi sehat sebanyak 3 BUMD dari 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sebesar 50%. Sehingga, capaian untuk indikator ini adalah 50%

b. Capaian Kinerja Outcome

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Kontribusi PAD dari sektor BUMD dicatatkan pada pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sampai dengan 31 Desember 2019 pendapatan dari sektor PAD tercatat sebesar Rp. 12.073.862.434 atau hanya tercapai 55.86% dari target tahun 2019 Rp. 21.614.515.182

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
2. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
3. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
4. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
5. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD
6. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence)

d. Kendala dalam pencapaian target kinerja

Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat.

Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Hambatan yang dihadapi oleh BUMD dalam mendongkrak kinerja pemerintah daerah antara lain :

1. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.
2. Marketing system yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah;
3. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis;
4. Kurang berfungsinya Badan Pengawas;
5. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi Debt to Equity Ratio yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif tinggi;
6. Kurangnya Inovasi untuk menunjang daya saing yang kuat
7. Keterbatasan sumber permodalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dari sisi pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya;
8. Belum tersusunnya regulasi yang lengkap dan memadai berkaitan dengan pemberian pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan BUMD dalam melakukan aksinya guna pemenuhan tuntutan masyarakat;
9. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD sehingga pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat mengalami keterbatasan;
10. Daya saing BUMD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dunia bisnis swasta murni. Hal ini sebagai akibat dari kurang fleksibilitasnya aksi korporasi dalam menghadapi persaingan jika dibandingkan dengan bisnis swasta;
11. Aset perusahaan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat dari regulasi maupun dari kemampuan SDM BUMD itu sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga mengurangi tingkat keuntungan.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 74,070,575,000,- pada penetapan APBD Tahun 2019 yang dijabarkan dalam 8 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Per Program Tahun 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,293,225,000.00	26,564,375,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,566,350,000.00	23,916,350,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	575,000,000.00	575,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	50,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,000,000.00	40,000,000.00
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	21,571,000,000.00	13,957,507,976.00
Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	600,000,000.00	168,800,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	1,375,000,000.00	780,339,000.00
TOTAL	74,070,575,000.00	66,052,371,976.00

Total anggaran Sekretariat Daerah berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 66,052,371,976,- dengan realisasi sebesar Rp. 48,059,607,382,- (72.76%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD
Per Program Tahun 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,564,375,000.00	19,787,709,396.00	74.49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,916,350,000.00	18,855,487,544.00	78.84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	575,000,000.00	225,475,000.00	39.21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,000,000.00	2,660,000.00	6.65
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	13,957,507,976.00	8,662,388,942.00	62.06
Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	168,800,000.00	63,305,000.00	37.50
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	780,339,000.00	462,581,500.00	59.28
TOTAL	66,052,371,976.00	48,059,607,382.00	72.76

Penyerapan anggaran sebesar 72,76% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.4.1. KEUANGAN

Efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2019 sebesar 72,76%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 66,052,371,976,- memiliki realisasi sebesar Rp 48,059,607,382,-.

3.4.2. SARANA DAN PRASARANA

- a. Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan kendaraan dinas operasional baik roda 4 maupun roda 2, beberapa Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti berikut:

Tabel 22
Peralatan/Kendaraan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS	PERUNTUKAN	KONDISI
1	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Wali Kota	Baik
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Mini Bus	Wakil Wali Kota	Baik
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Bagian Tata Pemerintahan	Baik
4	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Bagian Hukum	Baik
5	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Bagian Kesos	Baik
6	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Bagian Organisasi	Baik
7	Kendaraan Bermotor Penumpang	19	Mini Bus	Bagian Umum	Baik
8	Kendaraan Bermotor Penumpang	7	Mini Bus	Bagian Humas	Baik
9	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Mini Bus	Bagian Kerjasama	Baik
10	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Mini Bus	Bagian Tata Usaha	Baik
11	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Mini Bus	Bagian Pembangunan	Baik
12	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Mini Bus	Bagian PBJ	Baik
13	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Mini Bus	Bagian Perlengkapan	Baik
14	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Mini Bus	KORPRI	Baik
15	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Mini Bus	KPU	Baik
16	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Micro Bus	Bagian Umum	Baik
17	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Truck + Attachment	Bagian Umum	Baik
18	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Pick Up	Bagian Perlengkapan	Baik
19	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	Pick Up	Bagian Umum	Baik
20	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	Sedan	Bagian Umum	Baik
21	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	Staion Wagon	Bagian Humas	Baik
22	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7	Sepeda Motor	Wali Kota	Baik
23	Kendaraan Bermotor	3	Sepeda	Wakil Wali	Baik

NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS	PERUNTUKAN	KONDISI
	Beroda Dua		Motor	Kota	
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Sepeda Motor	Bagian Tata Pemerintahan	Baik
25	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	Sepeda Motor	Bagian Hukum	Baik
26	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Sepeda Motor	Bagian Kesos	Baik
27	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Sepeda Motor	Bagian Organisasi	Baik
28	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54	Sepeda Motor	Bagian Umum	Baik
29	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	Sepeda Motor	Bagian Humas	Baik
30	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4	Sepeda Motor	Bagian Kerjasama	Baik
31	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9	Sepeda Motor	Bagian Tata Usaha	Baik
32	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1	Sepeda Motor	Bagian Perekonomian	Baik
33	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4	Sepeda Motor	Bagian Pembangunan	Baik
34	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4	Sepeda Motor	Bagian PBJ	Baik
35	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11	Sepeda Motor	Bagian Perlengkapan	Baik
36	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1	Sepeda Motor	KORPRI	Baik
37	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1	Sepeda Motor	Balai Informasi Penyuluhan Pertanian	Baik
38	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	Sepeda Motor	KPU	Baik

- b. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi dan dokumen sehingga penyampaian dan pertukaran informasi tidak menggunakan dokumen cetak (paperless);

3.5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
1	15 Januari 2019	Piagam penghargaan peringkat B sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kemenpan-RB

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
2	09 Agustus 2019	Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
3	09 Agustus 2019	Penghargaan Kelengkapan Penyusunan Standar Laporan Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
4	09 Agustus 2019	Penghargaan Penyediaan Informasi Publik Setiap Saat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
5	09 Agustus 2019	Penghargaan Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
6	09 Agustus 2019	Peringkat 1 Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
7	5 DESEMBER 2019	Penghargaan KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Tahun 2018	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance* Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2019.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan nilai yang cukup berhasil karena capaian rata-rata 162.9% dari target, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan stakeholder.

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2019, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 162.9%;
2. Capaian dari IKU tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100%	100%
2	Persentase Capaian IKK yang meningkat	38%	65.74%
3	Nilai IKM	79	83
4	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	32%	100%
5	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	100%	50%

Dari lima IKU tahun 2019 terdapat satu indikator dengan capaian kinerja dibawah target yang telah ditetapkan yaitu Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat dengan capaian kinerja 50% dari target 100%

3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2019 yakni dari 72,76%.

4.2. RENCANA TINDAK

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Terhadap indikator yang belum berhasil yaitu Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat akan dilakukan upaya-upaya antara lain Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis serta peningkatan capaian Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (PerformanceExcellence) dan upaya-upaya lain dalam rangka peningkatan kinerja BUMD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

JL. Jend. A. Yani No. 1 Telp : 88960552, 88961767 Fax. 88959980
BEKASI

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH TAHUN 2019

yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : WIDODO INDRIJANTORO, S.H.,M.M
Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAT EFFENDI
Jabatan : WALI KOTA BEKASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target sasaran kinerja sesuai lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I :
 - a. Belanja langsung penunjang urusan (BLPU)
 - b. Belanja Langsung Urusan (BLU)
2. Lampiran II : Melakukan progres kebijakan pada lampiran I, lampiran a dan b berdasarkan progres per triwulan. Jika itu adalah belanja dan acuan sama dengan tugas sebagai dinas penghasil.

Sasaran kinerja berdasarkan lampiran 1 dan 2 akan di evaluasi setiap tiga (3) bulan oleh tim Pengendalian dan Evaluasi yang dibentuk oleh Wali Kota Bekasi, jika kegiatan pada lampiran tersebut berdasarkan laporan hasil tim tidak dapat memenuhi capaian dan keberhasilan maka saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya dan tidak akan melakukan gugatan secara hukum.

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI

Bekasi, 2019
PIHAK PERTAMA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI



WIDODO INDRIJANTORO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19611221 198603 1 010

LAMPIRAN I : Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(APBD TA. 2019)

Organisasi Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100%
		Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	38	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	38%
		Nilai IKM	Angka	79	Triwulan I	-
					Triwulan II	79
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	79
2	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	Persen	32	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	32%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100%

Jumlah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 26.293.225.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 23.566.350.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 575.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 50.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 40.000.000
6. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif : Rp. 21.571.000.000

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah : Rp. 1.375.000.000
8. Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD : Rp. 600.000.000

Keterangan
Anggaran APBD : Rp. 74.070.575.000

Bekasi, 2019

Pihak KEDUA,
WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Pihak KESATU
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



WIDODO INDRIJANTORO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19611221 198603 1 010

Lampiran II Alokasi Kegiatan Per Triwulan

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
2	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	797.250.000	159.450.000	239.175.000	318.900.000	79.725.000	
3	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	
4	Pengendalian Inflasi Daerah	188.385.000	37.677.000	56.515.500	75.354.000	18.838.500	
5	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	50.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	
6	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
7	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
8	Pembinaan Kehumasan	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
9	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	600.000.000	120.000.000	180.000.000	240.000.000	60.000.000	
10	Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan Kelembagaan	125.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	12.500.000	
11	Penelahaan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	
12	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	82.243.000	16.448.600	24.672.900	32.897.200	8.224.300	
13	Peningkatan Organisasi UKPBJ melalui program Sistering	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi forum pers	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	1.100.000.000	220.000.000	330.000.000	440.000.000	110.000.000	
16	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
17	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	400.000.000	80.000.000	120.000.000	160.000.000	40.000.000	
18	Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	90.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000	9.000.000	
19	Pendampingan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	
21	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	800.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000	80.000.000	
22	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
23	Website Kerja Sama Daerah	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
24	Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
25	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018	400.000.000	80.000.000	120.000.000	160.000.000	40.000.000	
26	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000	
27	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	800.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000	80.000.000	
28	Database Kerja sama Daerah	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
29	Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018	400.000.000	80.000.000	120.000.000	160.000.000	40.000.000	
31	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2.500.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	250.000.000	
32	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	900.000.000	180.000.000	270.000.000	360.000.000	90.000.000	
33	Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	
34	Evaluasi Produk Hukum Tahun 2010-2015	126.000.000	25.200.000	37.800.000	50.400.000	12.600.000	
35	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018 (PRODESKEKEL)	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
36	Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
37	Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
38	Penyuluhan Hukum	87.968.000	17.593.600	26.390.400	35.187.200	8.796.800	
39	Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	1.700.000.000	340.000.000	510.000.000	680.000.000	170.000.000	
40	Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
41	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
42	Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1.280.000.000	256.000.000	384.000.000	512.000.000	128.000.000	
43	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	400.000.000	80.000.000	120.000.000	160.000.000	40.000.000	
44	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.175.000.000	235.000.000	352.500.000	470.000.000	117.500.000	
46	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
47	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
48	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	
49	Bimbingan Teknis Legal Drafting	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
50	Monitoring dan Evaluasi K3	50.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	
51	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
52	Sinergitas instansi Vertikal	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Penyelenggaraan Keprotokolan	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
54	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
55	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2018	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000	
56	Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SISMONEPRA Kota Bekasi	75.000.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	7.500.000	
57	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	
58	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000	
59	Dana Kelurahan	19.764.696.000	3.952.939.200	5.929.408.800	7.905.878.400	1.976.469.600	
60	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesejahteraan	13.384.257.000	2.676.851.400	4.015.277.100	5.353.702.800	1.338.425.700	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah		-	-	-	-	
1	Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Setda	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
2	Pengembangan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah	350.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000
3	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	175.000.000	35.000.000	52.500.000	70.000.000	17.500.000
3	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD					
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000
2	Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000
3	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000
4	Pelatihan Manajemen Untuk Badan Usaha Milik Daerah	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000
5	Kajian Analisis Peluang Usaha PD. Mitra Patriot Kota Bekasi	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000.000	1.400.000.000	2.100.000.000	2.800.000.000	700.000.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.498.000.000	299.600.000	449.400.000	599.200.000	149.800.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	50.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	450.000.000	90.000.000	135.000.000	180.000.000	45.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	154.932.000	30.986.400	46.479.600	61.972.800	15.493.200
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.500.000.000	300.000.000	450.000.000	600.000.000	150.000.000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.000.000.000	400.000.000	600.000.000	800.000.000	200.000.000
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12.853.800.000	2.570.760.000	3.856.140.000	5.141.520.000	1.285.380.000
13	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000
14	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	30.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	3.000.000
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Setda	200.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	20.000.000
2	Pengembangan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah	350.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000
3	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	175.000.000	35.000.000	52.500.000	70.000.000	17.500.000
4	Penyediaan Ruang Kerja	416.350.000	83.270.000	124.905.000	166.540.000	41.635.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000	35.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.200.000.000	4.040.000.000	6.060.000.000	8.080.000.000	2.020.000.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000.000	300.000.000	450.000.000	600.000.000	150.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	250.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	25.000.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	750.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000	75.000.000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	300.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	30.000.000
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	125.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	12.500.000
3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan	20.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000

Bekasi,
Di, Sekretaris Daerah



WIDODO INDRIJANTORO, SH, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19611221 198603 1 010

LAMPIRAN II
RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2019

KODE				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,293,225,000	26,564,375,000
4	01	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000
4	01	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,000,000,000	7,000,000,000
4	01	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000,000	1,500,000,000
4	01	01	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500,000,000	500,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	450,000,000	450,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350,000,000	350,000,000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	200,000,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150,000,000	150,000,000
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155,000,000	155,000,000
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,500,000,000	2,650,000,000
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2,000,000,000	1,610,750,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12,353,225,000	11,863,625,000
4	01	01	22	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,000,000	100,000,000
4	01	01	30	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	30,000,000	30,000,000
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,566,350,000	23,916,350,000
4	01	02	12	Penyediaan Ruang Kerja	416,350,000	416,350,000
4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350,000,000	350,000,000
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,200,000,000	20,200,000,000
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,500,000,000	1,850,000,000
4	01	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	250,000,000	-
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	750,000,000	750,000,000
4	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100,000,000	350,000,000
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	575,000,000	575,000,000
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	300,000,000	300,000,000

KODE				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	125,000,000	125,000,000
4	01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150,000,000	150,000,000
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	50,000,000
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	50,000,000
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,000,000	40,000,000
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	20,000,000
4	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan	20,000,000	20,000,000
4	01	29		Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	21,571,000,000	13,957,507,976
4	01	29	01	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	250,000,000	-
4	01	29	02	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	800,000,000	800,000,000
4	01	29	03	Pengendalian Inflasi Daerah	200,000,000	88,590,000
4	01	29	04	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	50,000,000	30,000,000
4	01	29	05	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	200,000,000	-
4	01	29	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan	300,000,000	317,804,000
4	01	29	07	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	100,000,000	-
4	01	29	08	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	200,000,000	124,800,000
4	01	29	09	Pembinaan Kehumasan	200,000,000	200,000,000
4	01	29	10	Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan Kelembagaan	125,000,000	17,200,000
4	01	29	11	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	600,000,000	-
4	01	29	12	Penelahaan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah	250,000,000	79,550,000
4	01	29	13	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	400,000,000	400,000,000
4	01	29	14	Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	90,000,000	60,000,000
4	01	29	15	Peningkatan Organisasi UKPBJ melalui program Sistering	100,000,000	-

KODE				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	01	29	16	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi	250,000,000	212,000,000
4	01	29	17	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	300,000,000	15,000,000
4	01	29	18	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	1,100,000,000	20,550,000
4	01	29	19	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	800,000,000	330,100,000
4	01	29	20	Website Kerja Sama Daerah	300,000,000	-
4	01	29	21	Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah	300,000,000	280,000,000
4	01	29	22	Pendampingan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015	100,000,000	-
4	01	29	23	Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	250,000,000	250,000,000
4	01	29	24	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	150,000,000	37,285,000
4	01	29	25	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	800,000,000	-
4	01	29	26	Database Kerja sama Daerah	300,000,000	-
4	01	29	27	Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota	150,000,000	50,000,000
4	01	29	28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018	400,000,000	150,145,000
4	01	29	29	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350,000,000	350,000,000
4	01	29	30	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	900,000,000	192,500,000
4	01	29	31	Evaluasi Produk Hukum Tahun 2010-2015	126,000,000	10,000,000
4	01	29	32	Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	250,000,000	12,000,000
4	01	29	33	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018	400,000,000	85,975,976
4	01	29	34	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2,500,000,000	2,500,000,000
4	01	29	35	Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS	150,000,000	-
4	01	29	36	Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	1,700,000,000	2,620,000,000
4	01	29	37	Penyuluhan Hukum	100,000,000	-
4	01	29	38	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018 (PRODESKEL)	150,000,000	64,048,000
4	01	29	39	Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	300,000,000	300,000,000

KODE				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	01	29	40	Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	200,000,000	75,500,000
4	01	29	41	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	300,000,000	100,000,000
4	01	29	42	Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1,280,000,000	1,280,000,000
4	01	29	43	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	400,000,000	200,000,000
4	01	29	44	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150,000,000	50,000,000
4	01	29	45	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100,000,000	-
4	01	29	46	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,175,000,000	1,398,850,000
4	01	29	47	Bimbingan Teknis Legal Drafting	150,000,000	-
4	01	29	48	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	200,000,000	57,022,000
4	01	29	49	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	100,000,000	-
4	01	29	50	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200,000,000	197,000,000
4	01	29	51	Monitoring dan Evaluasi K3	50,000,000	44,000,000
4	01	29	52	Penyelenggaraan Keprotokolan	300,000,000	198,300,000
4	01	29	53	Sinergitas instansi Vertikal	100,000,000	5,326,000
4	01	29	54	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	200,000,000	200,000,000
4	01	29	55	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2018	150,000,000	-
4	01	29	56	Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SIMONTEPRA Kota Bekasi	75,000,000	45,740,000
4	01	29	57	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020	200,000,000	78,222,000
4	01	29	58	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	250,000,000	250,000,000
4	01	29	70	Penyusunan Kajian Pembentukan BUMD Pengelolaan Sampah	-	180,000,000
4	01	32		Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD	600,000,000	168,800,000
4	01	32	01	Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi	150,000,000	98,900,000
4	01	32	02	Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi	150,000,000	-
4	01	32	03	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	100,000,000	69,900,000
4	01	32	04	Pelatihan Manajemen Untuk Badan Usaha Milik Daerah	100,000,000	-

KODE				PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	01	32	05	Kajian Analisis Penyertaan Modal pada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi	100,000,000	-
4	01	34		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	1,375,000,000	780,339,000
4	01	34	01	Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Setda	200,000,000	200,000,000
4	01	34	02	Pengembangan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah	350,000,000	-
4	01	34	03	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	175,000,000	137,800,000
4	01	34	04	Pengelolaan LPSE	650,000,000	442,539,000

LAMPIRAN III
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,564,375,000								
4 01 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	0.01%	100%	5,000,000	70.00%	0.01%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 01 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,000,000,000	10.60%	100%	7,000,000,000	75.95%	8.05%	5,316,577,136	75.95%	
4 01 01 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000,000	2.27%	100%	1,500,000,000	17.74%	0.40%	267,573,000	17.84%	
4 01 01 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500,000,000	0.76%	100%	500,000,000	23.60%	0.18%	118,020,000	23.60%	
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	450,000,000	0.68%	100%	450,000,000	82.99%	0.57%	373,448,500	82.99%	
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350,000,000	0.53%	100%	350,000,000	69.84%	0.37%	244,445,600	69.84%	
4 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	0.30%	100%	200,000,000	100.00%	0.30%	186,001,500	93.00%	
4 01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150,000,000	0.23%	100%	150,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan tidak diserap karena menyesuaikan dengan kebutuhan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155,000,000	0.23%	100%	155,000,000	98.60%	0.23%	152,832,000	98.60%	
4 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,650,000,000	4.01%	100%	2,650,000,000	51.74%	2.08%	1,371,188,700	51.74%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,610,750,000	2.44%	100%	1,610,750,000	18.09%	0.44%	291,334,285	18.09%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	11,863,625,000	17.96%	100%	11,863,625,000	96.58%	17.35%	11,458,431,175	96.58%	
4 01 01 22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,000,000	0.15%	100%	100,000,000	60.00%	0.09%	7,857,500	7.86%	
4 01 01 30	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	30,000,000	0.05%	100%	30,000,000	10.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan tidak diserap karena menyesuaikan dengan kebutuhan
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 01 02 12	Penyediaan Ruang Kerja	416,350,000	0.63%	100%	416,350,000	60.05%	0.38%	250,000,000	60.05%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350,000,000	0.53%	100%	350,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Tidak dilaksanakan Karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Menggunakan Rumah Pribadi
4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,200,000,000	30.58%	100%	20,200,000,000	100.00%	30.58%	17,444,063,049	86.36%	
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,850,000,000	2.80%	100%	1,850,000,000	45.30%	1.27%	838,100,535	45.30%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	750,000,000	1.14%	100%	750,000,000	9.13%	0.10%	68,487,500	9.13%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4 01 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	350,000,000	0.53%	100%	350,000,000	85.00%	0.45%	254,836,460	72.81%	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
4 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	300,000,000	0.45%	100%	300,000,000	51.17%	0.23%	153,500,000	51.17%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	125,000,000	0.19%	100%	125,000,000	57.58%	0.11%	71,975,000	57.58%	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
						FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	
				Rp	%					
4 01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150,000,000	0.23%	100%	150,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan tidak diserap karena tidak adanya pengadaan Baju Olahraga
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	0.08%	100.00%	50,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan tidak diserap karena menyesuaikan dengan kebutuhan
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	0.03%	100%	20,000,000	100.00%	0.03%	-	0.00%	
4 01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan	20,000,000	0.03%	100%	20,000,000	13.30%	0.00%	2,660,000	13.30%	
4 01 29	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif									
4 01 29 01	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	-	0.00%	100%	-	88.41%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 02	Penyelenggaraan MTQ	800,000,000	1.21%	100%	800,000,000	100.00%	1.21%	607,719,000	75.96%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN			
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN					
								Rp	%				
4	01	29	03	Tingkat Kota Bekasi Pengendalian Inflasi Daerah	88,590,000	0.13%	100%	88,590,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4	01	29	04	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	30,000,000	0.05%	100%	30,000,000	45.00%	0.02%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4	01	29	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan	317,804,000	0.48%	100%	317,804,000	100.00%	0.48%	106,650,000	33.56%	
4	01	29	08	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	124,800,000	0.19%	100%	124,800,000	100.00%	0.19%	120,587,500	96.62%	
4	01	29	09	Pembinaan Kehumasan	200,000,000	0.30%	100%	200,000,000	83.00%	0.25%	-	0.00%	
4	01	29	10	Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan Kelembagaan	17,200,000	0.03%	100%	17,200,000	85.00%	0.02%	-	0.00%	
4	01	29	11	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	-	0.00%	100%	-	100.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4	01	29	12	Penelaahan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah	79,550,000	0.12%	100%	79,550,000	55.00%	0.07%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4	01	29	13	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	400,000,000	0.61%	100%	400,000,000	75.00%	0.45%	219,113,096	54.78%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 29 14	Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	60,000,000	0.09%	100%	60,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 16	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi	212,000,000	0.32%	100%	212,000,000	95.00%	0.30%	150,255,000	70.88%	
4 01 29 17	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	15,000,000	0.02%	-	15,000,000	89.37%	0.02%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 18	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	20,550,000	0.03%	100%	20,550,000	100.00%	0.03%	20,550,000	100.00%	
4 01 29 19	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	330,100,000	0.50%	100%	330,100,000	100.00%	0.50%	102,140,000	30.94%	
4 01 29 21	Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah	280,000,000	0.42%	100%	280,000,000	72.00%	0.31%	-	0.00%	
4 01 29 23	Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	250,000,000	0.38%	100%	250,000,000	90.00%	0.34%	197,455,000	78.98%	
4 01 29 24	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	37,285,000	0.06%	100%	37,285,000	100.00%	0.06%	17,792,000	47.72%	
4 01 29 25	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	-	0.00%	100%	-	100.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 27	Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota	50,000,000	0.08%	100%	50,000,000	30.00%	0.02%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN			
								Rp	%		
											dana APBD
4	01 29 28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018	150,145,000	0.23%	100%	150,145,000	100.00%	0.23%	23,378,000	15.57%	
4	01 29 29	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350,000,000	0.53%	100%	350,000,000	67.00%	0.36%	-	0.00%	
4	01 29 30	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	192,500,000	0.29%	100%	192,500,000	100.00%	0.29%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4	01 29 31	Evaluasi Produk Hukum Tahun 2010-2015	10,000,000	0.02%	100%	10,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	
4	01 29 32	Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	12,000,000	0.02%	100%	12,000,000	64.00%	0.01%	-	0.00%	
4	01 29 33	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018	85,975,976	0.13%	100%	85,975,976	100.00%	0.13%	30,306,000	35.25%	
4	01 29 34	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2,500,000,000	3.78%	100%	2,500,000,000	95.00%	3.60%	1,892,027,000	75.68%	
4	01 29 35	Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS	-	0.00%	-	-	55.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 29 36	Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2,620,000,000	3.97%	100%	2,620,000,000	92.00%	3.65%	2,384,050,500	90.99%	
4 01 29 38	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018 (PRODESKEKEL)	64,048,000	0.10%	100%	64,048,000	25.00%	0.02%	-	0.00%	
4 01 29 39	Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	300,000,000	0.45%	100%	300,000,000	90.00%	0.41%	185,280,000	61.76%	
4 01 29 40	Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	75,500,000	0.11%	100%	75,500,000	90.00%	0.10%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 41	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	100,000,000	0.15%	100%	100,000,000	45.00%	0.07%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 42	Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1,280,000,000	1.94%	100%	1,280,000,000	95.00%	1.84%	682,355,346	53.31%	
4 01 29 43	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	200,000,000	0.30%	100%	200,000,000	25.00%	0.08%	42,000,000	21.00%	
4 01 29 44	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	50,000,000	0.08%	100%	50,000,000	0.00%	0.00%	31,765,000	63.53%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 29 46	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,398,850,000	2.12%	100%	1,398,850,000	100.00%	2.12%	1,136,790,000	81.27%	
4 01 29 48	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	57,022,000	0.09%	100%	57,022,000	5.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 49	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	-	0.00%	100%	-	50.00%	0.00%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 50	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197,000,000	0.30%	100%	197,000,000	100.00%	0.30%	193,405,000	98.18%	
4 01 29 51	Monitoring dan Evaluasi K3	44,000,000	0.07%	100%	44,000,000	80.00%	0.05%	-	0.00%	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD
4 01 29 52	Penyelenggaraan Keprotokolan	198,300,000	0.30%	100%	198,300,000	100.00%	0.30%	189,752,500	95.69%	
4 01 29 53	Sinergitas instansi Vertikal	5,326,000	0.01%	100%	5,326,000	70.00%	0.01%	-	0.00%	
4 01 29 54	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	200,000,000	0.30%	100%	200,000,000	85.00%	0.26%	-	0.00%	
4 01 29 56	Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SISMONTPEPRA Kota Bekasi	45,740,000	0.07%	100%	45,740,000	100.00%	0.07%	38,340,000	83.82%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	BOBOT	TARGET S/D TW IV		REALISASI				KETERANGAN
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	FISIK TTB (%)	KEUANGAN		
								Rp	%	
4 01 29 57	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020	78,222,000	0.12%	100%	78,222,000	90.00%	0.11%	47,000,000	60.09%	
4 01 29 58	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	250,000,000	0.38%	100%	250,000,000	100.00%	0.38%	243,678,000	97.47%	
4 01 29 70	Penyusunan Kajian Pembentukan BUMD Pengelolaan Sampah	180,000,000	0.27%	100%	180,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	
4 01 32	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas BUMD									
4 01 32 01	Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi	98,900,000	0.15%	100%	98,900,000	0.00%	0.15%	-	0.00%	
4 01 32 03	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	69,900,000	0.11%	100%	69,900,000	100.00%	0.11%	63,305,000	90.57%	
4 01 34	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah									
4 01 34 01	Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Setda	200,000,000	0.30%	100%	200,000,000	0.00%	0.30%	-	0.00%	
4 01 34 03	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	137,800,000	0.21%	100%	137,800,000	100.00%	0.21%	123,581,500	89.68%	
4 01 34 04	Pengelolaan LPSE	442,539,000	0.67%	100%	442,539,000	60.00%	0.67%	339,000,000	76.60%	
JUMLAH		66,052,371,976	100%	100%	66,052,371,976		83%	48,059,607,382	73%	

LAMPIRAN IV PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Piagam penghargaan peringkat B sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



2. Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik



3. Penghargaan Kelengkapan Penyusunan Standar Laporan Layanan Informasi Publik



**4. Penghargaan Penyediaan Informasi Publik Setiap Saat
Penghargaan Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**



**5. Peringkat 1 Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi
dan Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Daerah**



6. Penghargaan KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA Tahun 2018





SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi